

**PENGGAJIAN KETERANGAN OLEH PENYIDIK DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Praktek Penyidikan Ganja Melalui PT. Rosalia Express)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



OLEH :

AINUR RIZQI KURNIAWATI

0671010038

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
SURABAYA
2010**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Disini, penulis mengambil judul “PENGGALIAN KETERANGAN OLEH PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Praktek Penyidikan Pengiriman Ganja Melalui PT. Rosalia Express)”

Penulisan proposal ini guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Dan dimaksudkan sebagai wahana untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Di samping itu juga diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi.

Proposal skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan dorongan oleh beberapa pihak. Pada kesempatan ini penulisan mengucapkan banyak terima kasih yang terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP, selaku Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur, atas dedikasinya yang beliau berikan kepada seluruh mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional
2. Bapak Haryo Sulistyantoro, S.H., M.M selaku Dekan Fakultas UPN “Veteran” Jawa Timur sekaligus Dosen Wali yang setia membimbing, mengarahkan,

3. Bapak Subani SH.Msi, selaku Kaprodi Fakultas Hukum dan pembimbing utama yang memiliki empati terhadap kondisi penulis.
4. Terima kasih kepada Bapak Wadek I dan Wadek II Fakultas Hukum
5. Ibu Mas Anienda TF.SH.MH, sebagai dosen pembimbing pendamping meluruskan kesalahan-kesalahan penulis.
6. Bapak Dosen selaku Tim Penguji yang telah memberikan evaluasi, kritikan dan masukan bagi penulis
7. Bapak Tauhid dan Pak Sariyanto. S.sos selaku Kabag Tata Usaha Fakultas Hukum.
8. Kapolda Jatim Irjenpol Drs.Pratikno
9. Dir Reskoba Polda Jatim Kombespol. Drs. Erwin Azhar Siregar.
10. Kasubagrenmin Kompol Yunik Rahayu.
11. Kabag Analis AKBP Roetji Roeshardjanto.
12. Kasat Binluh Dit Reskoba AKBP Debora Djihartin.
13. Brigadir Polisi Bimo Cahyadi.
14. Orang tua saya yang telah memberikan dukungan dana dan doa. Bapak Kurnan dan Ibu Sri Setyowati.

15. Adik-adikku Vera dan Nia yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
16. Sahabat- sahabat saya yang telah mendukung khususnya kepada Maya Dyah Ayu, Leny Eka N, Reny Pristiyani.
17. Seluruh teman- teman seangkatan 2006 khususnya kepada Ruben, Dony, Putu, Fajar, Wahib, yang telah membantu dan memberikan saran.
18. Rizqisyah yang telah membantu dan mendukung atas penyusunan skripsi ini.
19. Teman- teman saya yang telah membantu dalam pengumpulan data dalam skripsi ini Mas Alda dan Mas Hendri.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, Juni 2010

Penulis

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui tentang pelaksanaan penyidik kepolisian dalam menggali keterangan untuk mengungkap jaringan narkoba menurut aturan hukum yang positif. Di samping itu juga untuk mengetahui hambatan serta solusi penyidik dalam penggalan keterangan oleh penyidik dalam mengungkap jaringan narkoba . Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan penelitian, meliputi literature-literatur, perundang-undangan, dan wawancara. Analisa data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Cara penyidik dalam menggali keterangan untuk mengungkap tindak pidana narkoba melalui jasa penitipan telah sesuai dengan ketentuan pasal 75 UU Narkotika. Mengingat tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus serta adanya hal-hal khusus dan keperluan yang khas dalam tindak pidana narkoba. Dalam menggali keterangan dan mengungkap jaringan narkoba, penyidik kepolisian mempunyai tehnik, yaitu: Undercover buy adalah tehnik pembelian terselubung yang diawasi dan Controlled Delivery (penyerahan yang diawasi) yang meliputi Controlled import atau export “pass through”, Controlled Delivery dengan cooperating dependant atau kurir narkoba yang dapat diajak kerjasama, Controlled Delivery dengan undercover agent bertindak sebagai kurir sindikat. Serta adanya peningkatan kemampuan penyidikan oleh kepolisian kepada penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba.

Kata kunci: Penyidik, Tindak pidana, Narkotika.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|-----------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| ABSTRAKSI..... | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL DAN BAGAN..... | x |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Kajian Pustaka..... | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 20 |

BAB II CARA PENYIDIK DALAM MENGGALI KETERANGAN UNTUK MENGUNGKAP JARINGAN NARKOTIKA MELALUI JASA PENITIPAN

1. Tehnik dan taktik dalam penyelidikan, penyidikan oleh

| | |
|---|----|
| Anggota Dit Reskoba Polda Jatim..... | 25 |
| 2. Proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian dalam tindak pidana pengiriman ganja melalui jasa penitipan..... | 29 |
| 3. Kasus Pengiriman Ganja Melalui Jasa Penitipan PT. Rosalia Express..... | 33 |
| BAB III HAMBATAN DAN SOLUSI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP JARINGAN NARKOTIKA | |
| 1. Hambatan eksternal..... | 38 |
| 2. Hambatan Internal..... | 39 |
| 3. Solusi Penyidik dalam menngungkap jaringan narkotika... | 40 |
| 4. Upaya yang dilakukan Dit Reskoba Polda Jatim dalam menaggulangi tindak pidana narkotika..... | 43 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | |
| 1. Kesimpulan..... | 48 |
| 2. Saran..... | 49 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL DAN DAFTAR BAGAN

Tabel 1 Struktur Organisasi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim

Tabel 2 Rekapitulasi tersangka T.P. Narkotika Bulan November Tahun 2009

Tabel 3 Rekapitulasi tersangka T.P. Narkotika Bulan Desember Tahun 2009

Tabel 4 Rekapitulasi tersangka T.P. Narkotika Bulan Januari Tahun 2010

Tabel 5 Rekapitulasi tersangka T.P. Narkotika Bulan Februari Tahun 2010

Table 6 Rekapitulasi tersangka T.P. Narkotika Bulan Maret Tahun 2010

Tabel 7 Data Pengungkapan Perkara Pidana Narkoba Dit Narkoba Polda Jatim,
Perbandingan jumlah perkara pidana narkoba bulan oktober sampai dengan
November 2009

Tabel 8 Data Pengungkapan Perkara Pidana Narkoba Dit Narkoba Polda Jatim,
Perbandingan jumlah perkara pidana narkoba bulan November sampai dengan
desember 2009

Table 9 Data Pengungkapan Perkara Pidana Narkoba Dit Narkoba Polda Jatim,
Perbandingan jumlah perkara pidana narkoba bulan desember sampai dengan
januari 2010

Tabel 10 Perbandingan Ungkap Kasus Narkoba Tahun 2008 dibandingkan 2009

Bagan 1 Laporan Data Bulan November 2009 sampai dengan Maret 2010

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Perintah Penyidikan

Lampiran 2 Surat Perintah Tugas

Lampiran 3 Surat Perintah Penahanan

Lampiran 4 Surat Perintah Penangkapan

Lampiran 5 Surat Perintah Penyitaan

Lampiran 6 Berita Acara membawa tersangka/saksi

Lampiran 7 Berita Acara Penggeledahan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peredaran gelap narkoba di Indonesia tampaknya semakin marak. Saat ini, narkoba tidak hanya menjadi konsumsi bagi masyarakat di kota besar, tapi bagi masyarakat pedesaan pun narkoba tidak lagi menjadi barang langka. Ironisnya, tidak hanya di kalangan dewasa saja narkoba begitu dikenal dan dikonsumsi, tetapi di kalangan remaja dan anak di bawah umur pun juga sudah mengenal barang haram tersebut. Masalah narkoba adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Trend perkembangan kejahatan Narkoba di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Hasil analisis Polri atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir semua daerah di republik ini. Dengan kejadian ini, pada Produsen, Distributor dan Konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkoba¹.

Permasalahan yang menonjol saat ini adalah terjadi beberapa kasus di Indonesia sekarang ini telah dijadikan tempat pemasaran. Bahkan dijadikan sebagai produsen untuk jenis narkoba. Bila hal ini tidak ditanggulangi, akan dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara. Dalam permasalahan tersebut maka sangat diperlukan adanya tindakan para aparat penegak hukum untuk menanggulangi, memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba di

¹ O.C Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia*, Cetakan ke-2, PT. Alumni Bandung, 2007, h.vii.

Indonesia. Diantara Aparat penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting dalam menangani tindak pidana narkotika ialah penyidik. Dalam hal ini adalah Penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkoba.

Penyalahgunaan terhadap obat-obatan narkotika bisa menjadi awal terjadinya tindak pidana. Berbagai cara yang dilakukan untuk mendapatkan uang demi membeli obat-obat terlarang jenis narkotika, termasuk dengan cara-cara kriminal. Seperti mencuri, menjambret, menodong, merampok, bahkan menjual dirinya untuk memperoleh uang.

Dampak atau efek samping narkotika yang timbul dapat meresahkan masyarakat. Kekhawatiran yang membawa keprihatinan ini akan makin bertambah jika secara langsung mencermati proses dan penanggulangan peredaran gelap obat-obatan narkotika selama ini. Di televisi hampir setiap hari ditayangkan pengedar gelap narkoba. Ironisnya, meski sering dilakukan operasi terhadap pengedar, ternyata hal itu tidak pernah menyusutkan para bandar atau pengedar narkotika dan penggunanya untuk terus bertransaksi barang haram tersebut, bahkan ada kecenderungan semakin meningkat.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya yang penting adalah bahwa penggunaan narkoba diluar keperluan medis sangat berbahaya, merusak dan menimbulkan beban berat yang tidak terpisahkan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Adapun pengertian narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat dengan UU Narkotika) adalah Zat

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- undang ini.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standart pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai- nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, dalam Undang- undang ini diatur juga mengenai prekursor narkotika karna prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.².

Mencermati perkembangan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, telah menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam, bahwa narkoba telah mengancam langsung masa depan penerus bangsa. Tanpa pencegahan yang serius, ancaman itu bisa berlanjut pada penerus bangsa. Walaupun demikian, mungkin pada umumnya masyarakat belum menyadari dan merasa bahaya narkoba bukan urusannya selama anak atau keluarganya belum menjadi korban. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merabah ke daerah pemukiman, kampus bahkan sekolah- sekolah. Menjalarnya pemakaian narkoba memang sangat merisaukan. Cara menjerat mangsa sudah semakin intensif dan canggih, mulai cara- cara klasik denagan membujuk korban untuk mencoba secara gratis, menawarkan sebagai gaya hidup modern kepada para remaja, mempromosikan sebagai terapi, melangsingkan tubuh hingga sebagai obat mengatasi rasa capek. Yang terakhir dengan cara keji, anak- anak SD di bujuk dengan obat psikotropika berwujud permen dan dipikat dengan uang agar mau mencobanya³.

Kejahatan narkotika telah yang seringkali terjadi bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi

² Penjelasan Atas UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

³ O.C Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia*, Cetakan ke-2, PT. Alumni Bandung, 2007, h.258.

kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika yang sangat dibutuhkan sebagai obat- obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat ijin dari menteri kesehatan.

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti oleh proses penyesuaian diri yang kadang- kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika. Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Akhir-akhir ini peredaran narkotika juga terjadi semakin pesat melalui jasa pengiriman paket kilat dengan mencantumkan nama fiktif dan paket kotak yang berisi narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh warga berbek yang juga mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya yang berhasil di ungkap oleh Anggota Dit Reskoba Polda Jatim. Tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis ganja tersebut diduga dilakukan oleh tersangka Hafid Maulana pada hari selasa tanggal 15 desember 2009 sekitar jam 12.00 WIB, di jalan berbek gang 3 I No.4 RT 06, RW 04, kec. waru, kab. Sidoarjo dengan cara melakukan permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan/ menyediakan narkotika jenis ganja sebagaimana telah tercantum dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009⁴.

Berkaitan dengan hal tersebut diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah Penyidik. Dalam hal ini adalah Penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika khususnya ganja. Situasi yang demikian ini telah mendorong Institusi Kepolisian meningkatkan gerakan perang melawan narkoba yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Disisi lain, secara organisatoris juga terjadi peningkatan upaya- upaya penindakan yang dilakukan jajaran kepolisian dengan melibatkan seluruh potensi yang dimiliki, serta berbagai strategi dalam upaya menindak tegas pelaku kejahatan narkoba.

⁴ Data dari Polda Jatim

Memperhatikan permasalahan di atas nampak jelas bahwa ada beberapa kasus yang menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran bahkan dijadikan sebagai produsen Narkotika dan makin pesatnya peredaran narkotika serta penyalahgunaan terhadap barang haram tersebut. Keadaan tersebut di atas yang menarik penyusun untuk mengangkat permasalahan bagaimana kewenangan penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana narkotika dan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang semakin marak.

B. Perumusan Masalah.

1. Apa cara penyidik dalam menggali keterangan untuk mengungkap tindak pidana narkotika melalui jasa penitipan?
2. Apa hambatan-hambatan dan solusi penyidik dalam mengungkap jaringan narkotika?

C. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan penyidik kepolisian dalam menggali keterangan untuk mengungkap jaringan narkotika menurut aturan hukum yang positif.
2. Di samping itu juga untuk mengetahui hambatan serta solusi penyidik dalam penggalian keterangan oleh penyidik dalam mengungkap jaringan narkotika .

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan mempunyai kegunaan yang antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan penyidik kepolisian dalam menggali keterangan untuk mengungkap jaringan narkoba.
2. Dapat memberikan gambaran kepada Penyidik Kepolisian dalam menangani dan mengungkap jaringan narkoba.

E. Kajian Pustaka

1. Peredaran Gelap Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba

Saat ini Indonesia bukan hanya negara transit narkoba lagi, tetapi sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi pengeksport narkoba jenis ganja, ekstasi dll dengan indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri maupun paket dan kurir dari luar negeri yang di alamatkan langsung ke Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkoba. Sangat banyak

ditemukan jaringan peredaran narkoba yang berada di suatu negara termasuk Indonesia yang setelah dilacak ternyata mempunyai jaringan internasional⁵.

Kemiskinan menyebabkan orang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menurut ketentuan Pasal 6 UU Narkoba peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Penggunaan narkoba secara ilegal di seluruh dunia termasuk Indonesia menunjukkan peningkatan tajam merasuki semua bangsa dan umat semua agama, sehingga benar-benar mengkhawatirkan. Di tanah air sekarang penyalahgunaan narkoba sudah merambah di seluruh pelosok tanah air, segala lapisan sosial ekonomi, tempat hiburan, tempat kerja, hotel, dll.

Penyalahgunaan narkoba saat ini sudah memasuki kelompok remaja dan kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju dan bangsa-bangsa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di perkotaan maupun di pedesaan.

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan salah satu beberapa jenis narkoba yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.⁶

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Adapun penyebabnya pesannya yang penting adalah bahwa penggunaan narkoba

⁵ Hakim Arief, Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya, Cetakan 1, Penerbit Jember, 2007, hal. 16

⁶ www.inspirasi.com diakses pada tanggal 28 mei 2010

di luar keperluan medis berbahaya, merusak dan menimbulkan beban berat yang tidak terpisahkan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia.

2. Pengertian Penyelidikan Dan Penyidikan

Kepolisian merupakan bagian integral fungsi pemerintahan negara dibidang penegakan hukum. Sebagai aparat penegak hukum Kepolisian bertugas memelihara serta meningkatkan ketertiban dalam hukum yang salah satu tugasnya berkaitan dengan proses pidana sebagai kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu.

Yang dimaksud dengan penyidik menurut UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHAP), pada Pasal 1 ayat (1) adalah

” Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan ”

Berdasar pengertian di atas maka yang melakukan tugas sebagai penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Dengan diundangkannya Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI (selanjutnya disingkat dengan UU Kepolisian) maka semakin tegas diatur tentang

peranan Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pejabat Polisi merupakan penyidik utama di dalam perkara- perkara Pidana disamping penyidik dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil, hali ini telah diatur pada UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b. Dalam hal ini, untuk mendukung tugas kepolisian sebagai penyidik, maka diatur pula di dalam KUHAP kewajiban dan wewenang Pejabat Polisi dalam kegiatan penyidikan. Hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang- undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara.

Dalam melaksanakan kegiatan penyidikan dan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba selain Pejabat Kepolisian, di dalam UU Narkotika juga telah dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang (selanjutnya disingkat BNN). BNN sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintahan nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Sebelum dilakukan kegiatan penyidikan akan dilakukan penyelidikan, Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana memberi pengertian penyelidikan sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tugas utama dari penyelidik adalah penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk dilakukan pemeriksaan. Sedangkan

menurut KUHAP pada Pasal 1 butir (2) menentukan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah:

” serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya ”

3. Pengertian Jaringan Narkotika

Jaringan narkotika yaitu anggota dari suatu sindikasi dari tindak pidana narkotika. Yang terdiri dari beberapa kelompok yang di dalam jaringan tersebut yang mendukung dalam melakukan suatu tindak pidana. Yaitu, adanya penyandang dana, yang dimana dana tersebut digunakan untuk modal dalam melakukan penyalahgunaan narkotika. Adanya pemasok barang (obat), dimana obat tersebut akan diolah dan disalahgunakan menjadi zat yang berbahaya (narkotika). Adanya pengedar, yaitu orang atau oknum yang menyebarkan atau mendistribusikan sesuatu dalam ruang lingkup narkotika, yang tugasnya melakukan pengedaran barang terlarang atau narkotika kepada para pembeli setelah dilakukannya transaksi jual beli melalui komunikasi. Adanya bagian penyimpan barang, tugasnya untuk menyimpan barang narkotika agar tidak diketahui oleh siapapun. Dan adanya kurir, yang bertugas mengantarkan narkotika tersebut kepada pembeli.

4. Penggalian Keterangan Penyidik dalam Tindak Pidana Narkotika

Dalam menggali keterangan dan mengungkap jaringan narkotika, penyidik kepolisian mempunyai teknik sebagai berikut:

a. Controlled Delivery (penyerahan yang diawasi)

Adalah Pengiriman dan penyerahan Narkotika kepada penerima oleh kurir yang merupakan tersangka yang ingin bekerjasama dengan Polisi atau oleh **Undercover agent** yang bertindak sebagai kurir, Penyerahan tersebut diawasi untuk mengetahui siapa penerima atau jaringannya dan kemudian dilakukan penangkapan tersangka dan mengungkap jaringannya serta penyitaan barang bukti narkotika.

Dalam hal ini Controlled Delivery ada beberapa macam, yaitu:

1. Controlled import atau export “pass through”, yaitu suatu teknik penyelidikan Controlled Delivery atas import atau export barang yang diduga diselewengkan untuk tujuan produksi / pembuatan Narkoba.

Salah satunya dapat melalui jasa ekspedisi atau jasa pengiriman yang akhir-akhir ini semakin sering terjadi.

2. Controlled Delivery dengan cooperating dependant atau kurir narkotika yang dapat diajak kerjasama, dalam hal ini kurir adalah mantan pemakai atau mantan bandar.

3. Controlled Delivery dengan undercover agent bertindak sebagai kurir sindikat.

Undercover agent adalah petugas polisi yang melakukan penyusupan ke dalam sasaran sindikat atau organisasi kriminal. Dalam hal ini, penyidik

kepolisian telah membuat transaksi sendiri dengan anggota sindikat narkoba. Setelah mendapat barang bukti narkoba dari hasil transaksi yang dilakukan dengan para pelaku tindak pidana narkoba maka barang bukti tersebut di foto dan dibuatkan BAP Undercover Agent.

b. Undercover buy

Adalah tehnik pembelian terselubung yang diawasi. Dalam tehnik ini kepolisian masih melibatkan orang umum yang ingin dan dapat bekerjasama dengan kepolisian dalam transaksi ini⁷.

c. Proses tahapan penyidikan

Anggota Dit Reskoba (Direktorat Reserse Narkoba) Polda Jatim mempunyai tugas pokok dalam menangani kasus- kasus penyalahgunaan narkoba, yaitu :

1. Penyelidikan.

Berawal dari adanya info masyarakat dan diduga adanya tempat yang dijadikan sebagai transaksi dan peredaran narkoba salah satunya melalui jasa penitipan. Sebelumnya pihak kepolisian melakukan kerjasama atau koordinasi dalam mengungkap jaringan narkoba.

2. Penindakan.

Apabila ditemukan bukti adanya tindak pidana narkoba, maka polisi langsung melakukan proses penindakan di TKP, dengan melakukan Penggeledahan, Penyitan BB, dan Penangkapan.

⁷ Data dari Polda Jatim

Pengeledahan ada 2 macam yaitu pengeledahan rumah dan pengeledahan badan. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 17 KUHAP pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya, untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan ada atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Serta menurut ketentuan Pasal 1 butir 18 KUHAP pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta, untuk disita.

Dalam keadaan biasa di dalam melakukan pengeledahan penyidik haruslah mendapat ijin dari ketua pengadilan, adanya saksi, serta membuat berita acara.⁸

Penyitaan menurut ketentuan Pasal 1 butir 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Sesungguhnya penyitaan berkaitan erat dengan pengeledahan pada suatu tempat oleh penyidik biasanya diikuti oleh penyitaan, apabila ditemukan suatu benda, surat, dan sebagainya yang diperlukan untuk pembuktian di sidang pengadilan nanti.⁹

Pengertian penangkapan menurut ketentuan Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan

⁸ Sasangka hari, Penyidikan, *Penahanan, Penuntutan dan Pra Peradilan Dalam Teori dan praktek*, cetakan 1, Mandar Maju, 2007, hal.56

⁹ *ibid*

tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Perintah penangkapan tersebut tidak boleh dilakukan sewenang-wenang, tetapi harus dilakukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.¹⁰

Dalam tugas tersebut, para anggota dilengkapi dengan surat perintah tugas, geledah, sita, kap (penangkapan).

3. Penyidikan.

Para pelaku tindak pidana psikotropika akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu dilakukannya proses penyidikan dengan dibuatnya BAP saksi dan tersangka serta dilakukan Tes BB dengan Narco Pouch Taskit.

Adapun tata cara /prosedur penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka adalah sebagai berikut ¹¹;

1. Tersangka dan saksi- saksi di BAP (berita acara pemeriksian) yaitu:surat perintah tugas, surat perintah geledah, surat perintah sita, surat perintah tangkap, surat perintah ket saksi, surat perintah ket saksi ahli, surat perintah ket tersangka,dll);
2. Barang bukti dikirim ke labfor POLDA Jatim, jika hasil positif maka tersangka ditahan;
3. Melengkapi penyidikan (berita acara yang berkaitan degan penyidikan : surat perintah tugas penyelidikan dan surat perintah tugas penyidikan);

¹⁰ *ibid*

¹¹ Hasil wawancara dengan Iptu Khonis, Polres Surabaya Selatan, 6 November 2009.

4. Berkas dikirim ke PU.

5. Definisi Narkotika dan Jenis- jenis Narkotika

Pengertian Narkotika yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (cocaine). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (depence). Narkotika yang dibuat dari alam yang kita kenal adalah candu (opium), ganja dan cocaine¹².

Adapun pengertian narkotika menurut UU Narkotika ketentuan Pasal 1 ayat (1) adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- undang ini.

Golongan- golongan narkotika yang dimaksud dalam UU narkotika ketentuan pasal 6 ayat (1) terdapat 3 golongan, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Antara lain: Tanaman koka, tanaman ganja, opium, MDMA, Amfetamina, selanjutnya ada 65 Jenis (Lampiran I UU Narkotika).

¹² Hari sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, cetakan I, Mandar Maju, 2003, h.35.

- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Antara lain: Morfina, Bezitramida, Alfaprodina, selanjutnya ada 86 Jenis (Lampiran I UU Narkotika).

- c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

6. Tata Cara Penyaluran Narkotika

Mengenai syarat dan tata cara penyaluran narkotika diatur dengan peraturan menteri. Yang tercantum pada Pasal 43 UU Narkotika, yaitu :

1. Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. Apotek;
 - b. Rumah sakit;
 - c. Pusat kesehatan masyarakat;
 - d. Balai pengobatan; dan
 - e. Dokter.
2. Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:
 - a. Rumah sakit;
 - b. Pusat kesehatan masyarakat;

- c. Apotek lainnya;
 - d. Balai pengobatan;
 - e. Dokter; dan
 - f. Pasien.
3. Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.
4. Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
- a. Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - b. Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
 - c. Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
 - d. Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek.

7. Definisi Ganja dan akibat penyalahgunaan ganja

Ganja berasal dari tanaman *cannabis* yang mempunyai *varietas/famili. Cannabis Sativa, cannabis Indica* dan *cannabis Americana*. Tanaman *cannabis* merupakan tanaman setahun yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan istimewa, tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang. Pohonnya cukup rimbun dan tumbuh subur di daerah tropis dan dapat ditanam dan tumbuh secara liar di semak belukar¹³.

¹³ *ibid*, hal.47

Efek penggunaan ganja terhadap tubuh manusia, telah banyak ditulis oleh ahli. Efek tersebut lebih banyak buruknya daripada baiknya. Penggunaan ganja sendiri, untuk tujuan yang salah daripada untuk pengobatan. Efek penggunaan ganja menurut Franz Bergel, meliputi efek fisik dan psikis.

Efek penggunaan ganja secara fisik adalah:

Timbulnya ataxia yaitu hilangnya koordinasi kerja otot dengan saraf sentral;

1. Hilang atau kurangnya kerdipan mata;
2. Gerak refleks tertekan;
3. Menyebabkan kadar gula darah turun naik;
4. Nafsu makan bertambah;
5. Mata menyalah dan merah;

Sedangkan efek pemakaian ganja secara psikis adalah:

- a. Timbulnya sensasi psikis;
- b. Gembira, tertawa tanpa sebab;
- c. Lalai, malas;
- d. Senang dan banyak bicara;
- e. Terganggunya daya sensasi dan persepsi, khususnya terhadap ruang dan waktu;
- f. Lemahnya daya pikir dan daya ingatan;
- g. Cemas dan sensitif;

Selain efek-efek tersebut, ada efek kejiwaan yang lain yakni;

- a. Rasa kelegaan disertai sikap melamun;
- b. Membawa perubahan dalam kesadaran waktu;
- c. Membawa perubahan dalam persepsi visual dan auditif (tak menyambung);

Bahaya pemakaian ganja secara sosial adalah *amotivational syndrome*, yaitu:

- a. Menarik diri aktivitas sosial
- b. Perhatian terhadap sekolah, pekerjaan, dan pencapaian tujuan menurun¹⁴.

¹⁴ *ibid*, hal 53

Untuk dunia kedokteran, penggunaan ganja tidak ada, akan tetapi sebagai obat untuk menghilangkan rasa nyeri sudah dikenal kurang lebih 2000 tahun yang lalu di negeri cina, yakni untuk menghilangkan rasa nyeri pada waktu pembedahan.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu: mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma /kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan penelitian¹⁶. Data sekunder mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

a. Sumber Bahan Hukum Primer.

Sumber Bahan Hukum Primer yaitu Bahan Hukum yang terdiri atas peraturan perundang- undangan secara hierarki dan putusan- putusan pengadilan. Sedangkan Data Primer diperoleh melalui wawancara terstruktur, questioner, dan

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 52.

¹⁶ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 29

lain-lain. Pada penyusunan skripsi ini Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah:

- Undang- undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- Undang- undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Sumber Bahan Hukum sekunder, yaitu sumber bahan hukum yang diperoleh dari kajian kepustakaan, literatur- literatur, media cetak, pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, keterangan pihak- pihak terkait.

Penelitian ini juga membutuhkan data primer yaitu data yang diambil langsung dari lapangan sesuai dengan topik penulisan skripsi.

3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data skripsi diperoleh dari studi kepustakaan, dengan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan data primer yaitu dengan wawancara dan observasi dengan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah etode kualitatif, yaitu: menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tupang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan

interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian hasilnya akan dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajukan di dalam skripsi ini.¹⁷

5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data adalah di Instansi Kepolisian Daerah Jawa timuryang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 116 Surabaya. Adapun alasan penyusun melakukan penelitian di Polda Jatim karena kasus yang pernah ada telah di tangani oleh Polda Jatim. Dan Polda Jatim sering sekali mengungkapdan menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.

6. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan april minggu pertama, jangka waktu penelitian berlangsung selama 3 bulan 1 minggu. Karena yang menjadi pertimbangan adalah jangka waktu studi mahasiswa yang akan dibimbing, makin cepat pelaksanaannya, makin singkat pula waktu penyelesaian skripsi mahasiswa. Tahap persiapan penelitian selama 1 bulan, meliputi : penentuan judul penelitian, penulisan proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal. Tahap pelaksanaan penelitian selama 2 bulan terhitung mulai minggu pertama bulan April sampai Mei minggu terakhir, meliputi : pengumpulan sumber data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, pengolahan data dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penelitian selama 1 bulan, meliputi : kegiatan penulisan laporan penelitian, dan ujian lisan.

7. Jadwal Penelitian

¹⁷ *ibid*

Jadwal penelitian dilaksanakan selama 2 bulan terhitung mulai minggu pertama bulan April sampai Mei minggu terakhir, meliputi : pengumpulan sumber data sekunder di Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, pengolahan data dan penganalisaan data.

8. Rincian Biaya

Penelitian ini dibiayai secara pribadi oleh peneliti dan kedua orang tua peneliti. Rincian penggunaan dana adalah sebagai berikut :

1. Biaya tahap persiapan Rp. 300.000
2. Biaya tahap pelaksanaan Rp. 200.000
3. Biaya tahap penyelesaian penelitian Rp. 500.000

Jumlah semua rincian biaya yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebesar Rp. 1.000.000.-

9. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) bab dimana masing-masing bab terdiri dari atas sub bab yang berhubungan satu dengan yang lainnya secara jelas dan sistematika.

Bab I Pendahuluan, dikemukakan latar belakang yang tentang hal-hal yang mendasari skripsi ini yang berorientasi pada penggalian keterangan oleh penyidik dalam tindak pidana narkoba. Pada bab ini dibahas beberapa hal diantaranya: Latar belakang, dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penulisan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Pertanggungjawaban Sistematika.

Bab II, dalam bab ini, berisi tentang pembahasan permasalahan pertama yaitu cara penyidik untuk menggali keterangan dalam mengungkap jaringan melalui jasa penitipan, terdiri dari beberapa sub bab yaitu: teknik dan taktik penyelidikan, penyidikan oleh anggota Dit Reskoba Polda Jatim, Proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian dalam tindak pidana pengiriman ganja melalui jasa penitipan atau jasa ekspedisi, Kasus Pengiriman Ganja Melalui Jasa Penitipan.

Bab III, dalam bab ini berisi tentang pembahasan permasalahan yang kedua yaitu: Hambatan dan Solusi penyidik dalam mengungkap jaringan narkoba. Terdiri dari beberapa sub bab yaitu: Hambatan Eksternal dan Hambatan Internal, Solusi penyidik dalam mengungkap jaringan narkoba, Upaya yang dilakukan Dit Reskoba Polda Jatim dalam menanggulangi tindak pidana narkoba.

Bab IV, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari yang sudah dianalisa beserta saran yang dikemukakan yang berkaitan dengan permasalahan.